

TAJUK RENCANA

Di Balik Larangan Operasional Otoped

PAPAN larangan operasional skuter listrik atau otoped yang dipasang di beberapa titik strategis sepanjang sumbu filosofi Kota Yogya ternyata diabaikan oleh pengelola persewaan skuter listrik. Mereka mencari celah untuk melanggar dan kucing-kucingan dengan petugas. Ketika tak ada petugas berjaga, skuter listrik beroperasi hingga mengganggu pengguna jalan.

Sudah tidak kurang-kurang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar pengelola mematuhi larangan operasional skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi. Bahkan, Sultan mengancam menangkap mereka yang 'ngeyel' atau membandel. Namun tetap saja pelanggaran itu berlangsung. Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No 551/4671 tahun 2022 yang antara lain berisi larangan menggunakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, seolah diabaikan.

Berlatar belakang itulah agaknya Pemerintah Kota Yogya segera mengambil tindakan tegas, bukan hanya melarang operasional skuter listrik beroperasi di sepanjang sumbu filosofi, melainkan di seluruh wilayah Kota Yogya. Sebab, berdasar pemantauan yang dilakukan Pemkot Kota Yogya, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Yogya maupun DIY serta Satlantas, pengelola skuter listrik masih saja beroperasi secara kucing-kucingan. Hal ini, menurut Penjabat Walikota Yogya Sumadi, menjadi indikator bahwa tidak ada niat baik dari pengelola untuk ditata (KR 20/7).

Dari fakta yang terungkap, nampaknya pendekatan persuasif kepada pengelola skuter listrik tidak mempan, sehingga butuh pendekatan yang lebih tegas, yakni dengan upaya paksa melalui regulasi yang kini sedang disusun Pemkot Yogya. Regulasi tersebut tentu akan mengarah pada tindakan

pembinaan terhadap mereka yang membandel tidak mematuhi larangan, sehingga bakal dikenai sanksi penyitaan dan sebagainya.

Sebenarnya kita sangat menyayangkan tidak dipatuhinya zona larangan operasi skuter listrik di kawasan sumbu filosofi. Padahal zona larangan itu masih bersifat terbatas di jalan-jalan utama. Artinya, kalau larangan itu dipatuhi, kemungkinan masih ada area atau tempat lain yang diperbolehkan untuk operasional skuter listrik.

Namun lantaran tidak ada itikad baik dari pengelola, maka larangan itu diberlakukan untuk seluruh zona di kawasan Kota Yogyakarta. Kalau sudah demikian, pengelola jasa persewaan skuter listrik tentu rugi sendiri gara-gara mengabaikan SE Gubernur. Logikanya, mereka akan mencari tempat lain untuk menyewakan skuter listrik. Bahkan, boleh jadi mereka akan kucing-kucingan lagi.

Meski begitu, kita berharap langkah Pemkot Yogya melarang operasional skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogya tidak didasarkan atas sikap emosional, melainkan pada pertimbangan yang logis demi kemanfaatan masyarakat. Sebab, pada dasarnya, aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Kalau mau jujur, bila masyarakat sudah tertib dan punya kesadaran tinggi, termasuk dalam memanfaatkan jalan untuk kepentingan publik, niscara aturan tertulis yang bersifat formal tak diperlukan lagi. Hanya saja, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, butuh proses panjang, sehingga perlu dibuat aturan yang sifatnya memaksa.

Dalam konteks itulah kiranya kita bisa memahami mengapa Pemkot Yogya akan membuat regulasi yang melarang operasional skuter listrik atau otoped di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. □

Relasi Setara dalam Pencegahan Stunting

TAGAR #KeluargaKerenCegahStunting# adalah tanda bahwa stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan intensif. Sebagai negara darurat stunting, Indonesia memiliki agenda besar dalam hal upaya penurunan kasus stunting. Tingginya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun dipengaruhi beragam faktor. Tidak hanya mengalami permasalahan gagal tumbuh. Anak dengan stunting berisiko menderita penyakit menular dan tidak menular. Konsekuensi berantainya adalah, anak dengan stunting dapat mengalami gangguan perkembangan otak, fisik, mental, dan emosi.

Stunting dapat diperangi dengan meningkatkan relasi setara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga. Bantuan pangan yang terus digulirkan pemerintah melalui program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program-program komplementer lainnya tidak akan ada artinya bila keluarga abai terhadap kesejahteraan ibu dan anak. Stimulasi bantuan sosial untuk mencegah kejadian stunting terhadap keluarga pra sejahtera harus tetap melibatkan keluarga. Dalam hal ini, keluarga diintervensi agar memiliki relasi setara dan tekad yang kuat untuk mengelola bantuan sosial agar dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Keluarga Prasejahtera Keluarga prasejahtera harus terlibat aktif dalam pencegahan stunting. Mereka harus tampil nyata untuk memastikan aspek pemenuhan gizi pada pada pra kehamilan, kehamilan, pra kelahiran, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Meski memiliki masalah dalam hal ekonomi, keluarga pra sejahtera harus memprioritaskan pemenuhan gizi anak. Pada kenyataannya, hal ini tidaklah mudah. Tanpa relasi setara yang baik, komitmen untuk memberikan gizi bagi anak dapat mudah goyah. Tanpa relasi setara yang baik, kelu-

Nurul Lathiffah

arga prasejahtera akan mengabaikan pemenuhan gizi anak.

Meski berada dalam situasi ekonomi yang sulit, keluarga prasejahtera harus memprioritaskan pemenuhan gizi anak. Hal ini harus disadari penuh sebagai upaya untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan hebat. Meski kemiskinan mengepung, pemenuhan gizi anak selalu menjadi prioritas. Kesadaran ini-



KR-JOKO SANTOSO

lah yang harus dibangun dalam format berpikir keluarga Indonesia. Relasi setara harus terus ditingkatkan agar harus berdampak terhadap penurunan kejadian stunting.

Dalam hal fokus pencegahan stunting, relasi setara memiliki peran signifikan. Relasi setara berdampak pada sikap ramah perempuan dalam berbagai aspek. Yang memungkinkan perempuan mendapatkan prioritas pemenuhan gizi saat hamil, memberikan ASI eksklusif, memberikan MP (Makanan Pendamping) ASI, hingga tuntas menyusui selama 2 tahun. Jamak diketahui bahwa kekurangan gizi pada ibu hamil dan bayi da-

pat disebabkan kekurangan gizi kronis.

Kekurangan gizi kronis pada ibu hamil dan bayi disebabkan karena minimnya kesempatan bagi ibu dan bayi untuk mendapatkan gizi seimbang. Permasalahan ekonomi sering dikambinghitamkan. Namun demikian, sesungguhnya kekurangan gizi kronis pada ibu hamil, menyusui, dan bayi tidak melulu dihambat kemiskinan dan faktor ekonomi. Ketidakesetaraan dalam keluarga dan subordinasi terhadap perempuan justru ditengarai sebagai faktor utama yang menyebabkan anak stunting.

Perempuan Mengalah Seringkali terjadi, ekonomi keluarga buruk 'mengharuskan' perempuan untuk mengalah. Bahkan, ada beberapa tipe masyarakat yang rela tak menyiapkan menu gizi seimbang asalkan kebutuhan rokok dan konsumtif lainnya terpenuhi, asal makanan untuk Bapak sebagai kepala keluarga, bergizi. Kesalahan prioritas yang berakar dari ketidaksetaraan gender berakibat fatal. Stunting menjadi

penyakit yang terwujud dalam sikap keluarga yang ramah terhadap perempuan harus terwujud dalam pencegahan stunting. Hal ini sangat penting. Sebab hanya dengan perspektif setara dan ramah perempuan-anak, maka pemenuhan gizi untuk pencegahan stunting dapat terwujud optimal. □

*) **Nurul Lathiffah MPsi**, konselor pada LKPSA Fatayat Gunungkidul

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bantul yang Istimewa

Bambang Nugroho

28 Maret 1830 di Magelang.

Pascakemenangan, Pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrak-kontrak baru dengan Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta. Baik pembagian wilayah, pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak juga pembagian wilayah administrasi. Untuk wilayah Kesultanan Yogyakarta kemudian dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten yaitu Bantul Karang di kawasan selatan, Deggung di kawasan utara dan Kalasan di kawasan timur. Wilayah Kabupaten Bantul Karang inilah yang kemudian menjadi Kabupaten Bantul, diperkuat dengan UU Nomor 15 tahun 1950 berisi tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Sejarah mencatat wilayah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dan strategis sejak jaman berdirinya Kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati saat membuka hutan Mentaok, menjadi pusat pemerintahan Mataram berpindah di Kerta Pleret yang mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Sampai pada masa para kemerdekaan menjadi basis perlawanan melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda yang ingin menguasai lagi Indonesia.

Istimewa

Selain menjadi salah satu kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang dengan sendirinya juga istimewa. Kabupaten Bantul memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki kabupaten/kota lain terutama di

RABU Pahing 20 Juli 2022 kemarin, bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Bantul ke-191. Berdirinya Kabupaten Bantul ditetapkan pada hari Rabu Kliwon, 20 Juli 1931 bertepatan 10 Sapar tahun Dal 1759, saat dilantikannya seorang Nayaka Keraton Yogyakarta Tumenggung Mangun Negoro sebagai Bupati Bantul I oleh Sri Sultan Hamengku Buwono V. Pada peringatan tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bantul mengangkat tema 'Bantul Gumregah Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis Sejahtera dan Berkeadilan'.

Berbagai rangkaian kegiatan mewarnai peringatan tahun ini yang digelar kembali sejak sebulan lalu. Seperti pertandingan olah raga, silaturahmi ke mantan bupati dan wakil bupati, ziarah ke makam mantan bupati, sarasehan, bakti sosial, lomba kebersihan lingkungan dan lainnya. Puncak peringatan dengan upacara dalam nuansa tradisi Jawa di lapangan Trirenggo diisi dengan kirab bregada antarkapanewon. Tentu saja peringatan setelah pandemi Covid-19 mereda tidak sebatas pada kegiatan hingar bingar seremonial, tetapi bisakah menjadi spirit untuk bekerja lebih keras meraih kemajuan sehingga Bantul menjadi lebih sejahtera dan istimewa?

Sejarah

Memperingat sebuah hari jadi atau hari ulang tahun tidak bisa dilepaskan dari peristiwa atau kejadian penting di masa lalu. Baik bersifat individu maupun sosial di saat peristiwa itu terjadi. Maka dalam memperingati Hari Jadi Kabupatn Bantul ke-191 tahun 2022 ini, tidak bisa dilepaskan saat berdirinya 20 Juli 1931 pascaperang Jawa (1825-1830). Perang 'dimenangkan' Hindia Belanda melalui akal licik Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock ketika menangkap P Diponegoro

sektor sosial budaya dan wisata. Seperti Makam Raja-raja Mataram dan makam seniman di Imogiri, indahnya pantai Parangtritis dan pantai Parangkusuma yang terkenal dengan mitos Ratu Kidul serta pantai lain

Bantul juga memiliki banyak museum, tempat mukim dan berkaryanya para seniman budayawan lokal, regional, nasional sampai internasional. Pusat aneka industri kerajinan sampai industri kreatif lainnya. Bahkan ratusan komunitas seni tradisi maupun modern serta mukimnya para intelektual dari kalangan akademisi dengan adanya kampus-kampus perguruan tinggi.

Potensi sosial budaya yang demikian istimewa. Diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mewujudkan Bantul semakin baik dan sejahtera di masa depan. □

*) **Bambang Nugroho**, Ketua Paguyuan Sastrawa Jawa Bantul (PSJB) 'Paramarta',

Pojok KR

Kini otoped dilarang operasi di seluruh Kota Yogya.

-- **Ini akibatnya kalau langgar SE Gubernur.**

Kasus baku tembak polisi ditangani Polda Metro Jaya.

-- **Berharap profesional dan transparan.**

Bantul dorong program unggulan tuntas tahun 2025.

- **Bantul bersih sampah bisa jadi percontohan.**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Salut Ketegasan Pemkot Yogya

SIKAP tegas yang kini diterapkan Pemkot Yogya yang melarang otoped atau skuter listrik di seluruh wilayah kota, pantas diacungi jempol bahkan didukung. Bagaimana tidak? Sudah diajak bicara baik, diberi kesempatan hanya tidak boleh di kawasan tertentu yakni sumbu filosofi. Juga sudah ada SE Gubernur. Kok masih melanggar dan kucing-kucingan pula?

Ini sangat tidak pantas dan sangat tidak ingin menjaga Yogya Istimewa yang ditandai di antaranya dengan sumbu filosofis tersebut. Terlebih kita warga

Yogya sedang menjaga benar agar konsep sumbu filosofi ini bisa diakui dunia melalui Unesco. Tentu semua warga, seharusnya menjaga 'warisan' pendiri Ngayogyakarta Hadiningrat ini.

Apalagi pengguna yang sebagian besar berusia muda tersebut juga kadang seandainya menggunakan jalanan bahkan melanggar lalulintas. Karena menurut saya, sudah tidak perlu ada toleransi bagi pengelola tersebut. Benar, dia sudah tidak menunjukkan itikad baik. □

Pembaca KR, 0812155xxxxx

Kedaulatan Rakyat

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mubshada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiatfi, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Eddy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd, Wakil: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP